

Panduan Meliput Isu Globalisasi



AJI INDONESIA

Aliansi Jurnalis Independen [2012]

Jakarta, Indonesia

Panduan Meliput Globalisasi

© AJI Indonesia

Penulis : **Farid Gaban**

Editor : **Nezar Patria**

Tata letak : **RLDSG**

Cetakan Pertama: Januari 2012

Diterbitkan oleh:



AJI INDONESIA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen

Jakarta Pusat 10420 – Indonesia

Tel. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261

www.ajiindonesia.org

Didukung oleh:

LOGO D&P

DAFTAR ISI

Introduksi: Belajar dari Krisis	5
Pertempuran Seattle dan Musim Semi Arab	11
Dua Wajah Globalisasi	17
Meliput Globalisasi, Berenang Antara Karang	29
Sejumlah Tema Liputan Globalisasi	37
Kiat Menyajikan Liputan Globalisasi	83

Introduksi: Belajar dari Krisis

KRISIS 1998 adalah tonggak besar dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Sebelum krisis, para ekonom melihat abad ke-21 sebagai “Abad Asia” dengan Indonesia sebagai salah satu “Macan Asia” yang trengginas, dengan pertumbuhan ekonomi paling mengagumkan. Bahkan ketika ekonomi negeri lain di Asia berguguran seperti kartu domino, para ekonom yakin bahwa Indonesia akan bisa bertahan dari badai. Betapa kelirunya mereka.

Indonesia adalah negeri yang paling parah terkena Krisis 1998. Inflasi meroket hingga 80 persen dan nilai rupiah terbanting ke dasar, sekaligus memicu krisis ekonomi-politik dramatis. Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru selama 30 tahun lebih, jatuh menyusul kerusuhan sosial yang menewaskan 1.200 orang lebih. Dampak krisis itu masih dirasakan hingga kini, belasan tahun kemudian.

Sebentar sebelum jatuh, Presiden Soeharto mengundang bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan menandatangani Letter of Intent, semacam surat perjanjian.

Isi perjanjian tersebut antara lain adalah kewajiban Indonesia untuk melakukan deregulasi dan liberalisasi ekonomi sebagai imbalan dari bantuan yang diberikan IMF: mengatasi korupsi, mengurangi anggaran publik (subsidi), mendorong privatisasi perusahaan negara, serta membuka Indonesia agar lebih ramah bagi investor internasional.

Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent disaksikan Michael Camdessus dari IMF, 15 Januari 1998

Letter of Intent tersebut dimaksudkan untuk menarik Indonesia lebih jauh ke pergaulan ekonomi-keuangan internasional yang dikenal sebagai globalisasi. Bagi yang setuju, keterlibatan Indonesia dalam globalisasi akan memacu pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Bagi yang mengkritik, globalisasi telah melucuti kendali pemerintah pada kebijakan publik dalam bidang ekonomi yang justru bermuara pada kesenjangan dan kemiskinan rakyat.



Dari sudut pandang lain lagi, Letter of Intent IMF pada dasarnya adalah sebuah penyerahan kedaulatan (rekapitulasi) yang melukai rasa nasionalisme.

Pada era Megawati Soekarnoputri, Indonesia melepaskan diri dari IMF. Namun, kecenderungan deregulasi dan liberalisasi terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan merambah ke sektor yang lebih luas, termasuk pendidikan, kesehatan serta pengelolaan sumberdaya alam seperti air. Deregulasi, liberalisasi dan privatisasi itu memiliki dampak besar bagi masyarakat. Pencabutan subsidi seperti bahan bakar dikeluarkan banyak orang. Demikian pula dengan kian mahal nya biaya pendidikan dan ongkos berobat.

Krisis 1998 memaksa pemerintah lewat Bank Indonesia memberikan suntikan dana kepada dunia perbankan yang sebagian dimiliki para konglomerat swasta yang bangkrut. Tak hanya pemerintah memberikan dana talangan berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tapi juga menyuntik dana lewat utang. Pemerintah juga mengeluarkan obligasi, atau surat utang, untuk menambah modal (rekapitalisasi) bank-bank. Jumlah total BLBI dan obligasi rekap mencapai Rp 700 trilyun dan membuat utang negara (utang publik) Indonesia naik dua kali lipat dari era Soeharto.

Pemerintah Indonesia masih harus mencicil utang tersebut sampai sekarang. Cicilan itu menggerus anggaran negara, membuat pemerintah selalu mengeluh kekurangan dana untuk membangun infrastruktur serta program-program sosial pengentasan kemiskinan. Banyak pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan transportasi publik, belakangan cenderung diserahkan pada swasta yang membuat masyarakat harus membayar lebih mahal.

Utang pula yang menjadi alasan ketika pemerintah mulai menjual perusahaan-perusahaan negara seperti Telkomsel dan Indosat. Tak hanya boom telekomunikasi akhirnya dinikmati investor dan negeri asing, penjualan aset negara juga memicu perdebatan tentang nasionalisme.

Berbagai hal buruk tadi merupakan dampak langsung dari Krisis 1998 yang masih kita rasakan sampai sekarang.

Merenungkan Krisis 1998 dan dampaknya yang sangat dramatis bagi masyarakat, banyak orang bertanya:

- Di manakah peran media massa?
- Mengapa media massa tidak bisa menjadi pembawa pesan peringatan dini sebelum datangnya bencana atau krisis?
- Mengapa di era demokrasi, pasca-1998, media tak mampu mengkritisi kebijakan mengalihkan beban utang privat (swasta) kepada utang publik (rakyat kebanyakan) sebesar Rp 700 triliun?

Dan satu pertanyaan terpenting:

- Jika media adalah salah satu pilar demokrasi mengapa dia tak bisa membekali masyarakat untuk turut serta dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan?

Ada banyak jawaban untuk pertanyaan tadi. Tapi, salah satu yang mencolok dan harus diakui adalah bahwa media-massa belum berperan, atau kecil perannya, dalam membantu masyarakat secara kolektif merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan.

Renungan dan pertanyaan di atas tidak khas Indonesia. Di Amerika, pertanyaan serupa terhadap media diajukan

di tengah maraknya skandal perusahaan seperti Enron dan Worldcom pada era “Internet Bubble” dan pada Krisis 2008 yang membangkrutkan banyak lembaga keuangan Amerika dan dampaknya kemudian merembet pula ke Eropa.

Berbagai krisis tadi menunjukkan bahwa ekonomi terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada ekonom dan kaum teknokrat. Masyarakat harus ikut terlibat. Tapi hanya masyarakat yang memiliki pemahaman (*informed-citizen*) yang bisa terlibat. Sayangnya, media massa belum maksimal membantu masyarakat memahami rumitnya persoalan ekonomi.

Berita ekonomi-bisnis-keuangan jarang disajikan sederhana, menarik, mudah dipahami. Berita-berita tersebut belum mampu membuat masyarakat paham persoalan serta dampak dari sebuah peristiwa ekonomi. Penyajian berita ekonomi-bisnis umumnya menjemukan, kering dan menjengkelkan karena terlalu banyak istilah teknis yang tak mudah dipahami.

Salah satu sumber masalahnya: jurnalis sendiri umumnya tak cukup paham masalah atau terlalu elitis sehingga kesulitan menyajikan berita ekonomi-bisnis secara populer. Ini problem utama dalam liputan ekonomi-bisnis, dan khususnya dalam kaitan dengan globalisasi.

Buku kecil ini diharapkan bisa membantu jurnalis memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi dan dengan begitu mereka bisa menyajikan liputan globalisasi lebih baik sekaligus membantu masyarakat memahami fenomena yang berdampak besar bagi diri mereka, secara individu maupun sebagai warga negara.

Buku ini tak mungkin membahas seluruh isu globalisasi

yang kompleks dan luas, melainkan mencoba memberi pengantar dan prinsip sederhana dalam meliputnya.*

Pertempuran Seattle dan Musim Semi Arab

KRISIS Keuangan Asia pada 1998 dan Krisis Ekonomi Global 2008 menunjukkan bahwa dunia sudah semakin menyatu dan negara-negara saling berpengaruh. Pada 2008, kebangkrutan raksasa finansial Amerika menjalar ke Eropa di seberang Atlantik dan beberapa negara Asia di seberang Pasifik. Sepuluh tahun sebelumnya, krisis yang berawal dari Thailand kemudian menjalar ke Korea Selatan dan Asean, termasuk Indonesia.

Dunia kita sudah terikat satu sama lain. Keuangan. Makro ekonomi. Investasi. Tenaga kerja. Kemiskinan. Inilah fenomena yang kita sebut globalisasi.

Tapi, globalisasi adalah istilah yang problematik, mengandung pro-kontra. Bagi para pendukungnya globalisasi membawa pertumbuhan ekonomi yang memicu kesejahteraan. Bagi penentangannya, globalisasi disebut telah menyebabkan ketimpangan, pemiskinan, kerusakan lingkungan bahkan pelanggaran hak asasi dan demokrasi. Dampak itu begitu serius sehingga belakangan muncul gerakan anti-globalisasi.

Gerakan anti-globalisasi sebenarnya tidak mengkritik globalisasi itu sendiri. Tapi, mereka menuduh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia terlalu dominan mendikte kebijakan ekonomi negara, serta memicu kesenjangan dan ketidakadilan global. IMF, Bank Dunia serta lembaga

lain seperti World Trade Organization (WTO) dan World Economic Forum bahkan sering dipandang sebagai agen kapitalisme global, atau orang sering pula menyebutnya agen neoliberalisme.

Kritik keras terhadap globalisasi justru muncul di negeri-negeri industri maju, atau negeri kapitalis, seperti Amerika Serikat. Pada 1999 meletus demonstrasi besar di Seattle, Washington, Amerika Serikat, bersamaan dengan Konferensi WTO di sana. Para demonstran, yang datang dari seluruh penjuru dunia, menentang WTO yang mereka anggap salah satu agen globalisasi kapitalisme. Demonstrasi yang semula damai itu berubah jadi kerusuhan, orang menyebutnya sebagai “The Battle of Seattle”. Dari situlah muncul gerakan anti-globalisasi yang lebih terorganisasi seperti World Social Forum.





Gerakan anti-globalisasi World Social Forum tidak menolak kerjasama internasional (globalisasi itu sendiri), tapi menginginkan kerjasama global untuk mempromosikan kemaslahatan sosial bagi warga dunia.

“The Battle of Seattle” mewakili sebuah pergulatan ideologi yang hampir abadi antara kapitalisme dan sosialisme. Orang yang mengatakan “sejarah sudah berakhir” dengan kemenangan sistem pasar kapitalisme terbukti keliru.

Kerusuhan dan demonstrasi besar yang melanda Dunia Arab hampir sepanjang 2011 tidak hanya menentang para diktator, tapi juga melawan sebuah sistem kapitalis Barat yang melindungi para diktator seperti Husni Mubarak di Mesir. Pertumbuhan ekonomi tinggi di banyak negeri Arab tidak menghalangi orang turun ke jalan karena menyaksikan ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi.

Demonstrasi di Seattle, Washington, pada 1999. Memprotes globalisasi yang dipromosikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)



Sekitar setengah juta orang turun ke jalan di kota-kota Israel September 2011. Mereka memprotes naiknya harga barang dan perumahan serta mengancam privatisasi sektor publik.

Bahkan Israel, sekutu Amerika terpenting di Timur Tengah, juga tidak kebal. Ancaman terbesar Pemerintah Israel terbukti bukan gerilyawan Palestina, tapi rakyatnya sendiri. Pada pertengahan 2011, demonstrasi besar-besaran melanda kota-kota dalam sebuah protes terbesar sepanjang sejarah negeri Yahudi itu. Rakyat mengeluhkan kesulitan ekonomi, rapuhnya jaminan sosial dan memprotes arus deras privatisasi sektor publik seperti perumahan.

Patut juga dilihat reaksi atas krisis ekonomi di Amerika Serikat, dengan munculnya gerakan Occupy Wall Street. Gerakan “menduduki ruang” itu bangkit pada September 2011 di New York, dan menjalar ke lebih 100 kota di Amerika Serikat, serta ribuan kota lainnya di dunia. Diperkuat

jejaring sosial di Internet, gerakan itu menggugat kekuasaan lembaga bank besar, serta perusahaan multinasional yang dituding menganggangi proses demokrasi. Soalnya, di tangan 1 persen para penguasa modal dan lembaga keuangan itu, menguasai sekitar 25 persen PDB AS yang nilainya mencapai sekitar US\$14 triliun. Nasib 99 persen rakyat AS, dan dunia pun dipertaruhkan.*

Dua Wajah Globalisasi

MELIPUT globalisasi tak bisa dipisahkan dari memperkaya pengetahuan jurnalis tentang dinamika politik internasional dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Definisi sederhana dan netral dari globalisasi:

Globalisasi adalah proses interaksi dan penyatuan masyarakat, perusahaan dan pemerintahan antar negara, sebuah proses yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional serta dibantu oleh kemajuan teknologi informasi.

Globalisasi sebenarnya bukan fenomena baru. Selama ribuan tahun, manusia—dan belakangan korporasi/perusahaan—telah melakukan transaksi jual-beli meski dipisahkan oleh jarak yang jauh. Jalur Sutra, misalnya, yang melintasi Asia Tengah dikenal sebagai jalur dagang yang menghubungkan China dan Eropa di Abad Pertengahan.

Selama berabad-abad, manusia dan perusahaan juga berinvestasi dalam bisnis di belahan dunia lain. Perluasan usaha dan penjajahan yang dilakukan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC-Belanda) dan British East India Company (Inggris) adalah salah satu manifestasi globalisasi pada dua-tiga abad lalu.

Namun, didukung terutama oleh kemajuan teknologi informasi, internet dan telekomunikasi, arus deras

gelombang globalisasi terjadi terutama dalam beberapa dekade terakhir sejak Perang Dunia II.

Gelombang globalisasi kontemporer sekarang ini didorong oleh serangkaian kebijakan yang terutama dipromosikan oleh World Bank, IMF dan WTO dalam membuka ekonomi secara domestik maupun internasional. Dalam beberapa tahun sejak Perang Dunia II, terutama dalam dua dekade terakhir, banyak pemerintahan telah mengadopsi sistem ekonomi pasar-bebas, yang secara luar biasa meningkatkan potensi produktif mereka dan menciptakan beraneka-ragam peluang baru dalam perdagangan dan investasi internasional.

Banyak negara juga membongkar berbagai hambatan dalam perniagaan serta menyepakati perjanjian internasional untuk mendorong bebasnya gerak lalu-lalang barang, jasa dan investasi. Mengambil manfaat dari peluang-peluang baru di negeri lain, korporasi membangun pabrik di negeri lain dan melakukan kerjasama produksi serta pemasaran dengan rekanan asing.

KONSENSUS WASHINGTON

Sosok globalisasi yang paling mencolok, karenanya, adalah penyatuan bangunan bisnis industri dan finansial global tadi. Kebijakan penting dalam globalisasi sering disebut The Washington Consensus. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada 1989 oleh John Williamson, ekonom pada Institute for International Economics. Williamson menggunakan istilah tersebut untuk meringkaskan tema yang secara umum disepakati oleh para penasihat kebijakan pada lembaga-lembaga yang bermarkas di Washington DC, ibukota Amerika Serikat: Bank Dunia, Dana Moneter

Internasional (IMF) dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Isi dari konsensus itu:

- Disiplin kebijakan fiskal, menghindari defisit keuangan relatif terhadap GDP.
- Pengalihan anggaran publik dari subsidi (terutama subsidi tak langsung) kepada investasi infrastruktur, jasa layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang luas dibutuhkan kaum miskin.
- Reformasi pajak, memperluas basis wajib pajak dan penerapan tingkat pajak yang moderat.
- Liberalisasi perdagangan: liberalisasi impor, khususnya penekanan pada penyingkiran hambatan kualitatif seperti lisensi; setiap proteksi perdagangan diberikan melalui tarif yang rendah dan seragam.
- Liberalisasi masuknya investasi langsung.
- Privatisasi perusahaan negara.
- Deregulasi: penghilangan semua bentuk regulasi yang menghambat masuknya barang dan jasa atau menghambat kompetisi, kecuali regulasi yang dibenarkan dalam kaitan dengan keamanan, lingkungan dan perlindungan konsumen.
- Jaminan hukum bagi hak cipta dan paten.

Meski semula dimaksudkan sebagai resep untuk mengatasi Krisis Utang Amerika Latin pada 1980-an, Konsensus Washington belakangan dipromosikan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Margaret Thatcher memanfaatkan format ekonomi ini untuk menggalang pendukung dalam konteks

Perang Dingin melawan Blok Soviet. Dalam kampanye pro-globalisasinya, Thatcher mempopulerkan istilah “TINA”—There is No Alternative (tak ada alternatif dari kapitalisme).



Ronald Reagan dan Margaret Thatcher

Disamping kebijakan tadi, teknologi adalah motor penggerak utama lain dari globalisasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah secara dramatis menransformasi kehidupan ekonomi. Teknologi informasi telah memberi para aktor ekonomi (konsumen, investor, pengusaha) perangkat baru yang sangat bernilai dalam mengidentifikasi dan menggali peluang-peluang ekonomi, termasuk analisis trend ekonomi yang lebih cepat dan lebih mudah dicerna di seluruh dunia, mempermudah transfer aset dan memacu kolaborasi dengan rekanan-rekanan yang terasa muskil di masa lalu.

Ekonomi, perdagangan, investasi, kebijakan politik dan teknologi informasi. Globalisasi karenanya merupakan fenomena yang kompleks. Proses tersebut memiliki dampak pada lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta kesehatan fisik umat manusia di seluruh dunia.

Itu menjadi tantangan tersendiri bagi para jurnalis. Globalisasi adalah fenomena multi-dimensi dan multi-disiplin, bukan hanya ekonomi dan keuangan. Meliput hal seperti ini menuntut jurnalis untuk memiliki wawasan lebih luas dari sekadar wawasan ekonomi dan bisnis.

Lebih dari itu, globalisasi merupakan juga ajang klaim yang saling bertentangan. Jurnalis atau media perlu memahami klaim yang berbeda tersebut.

Para pendukung globalisasi menekankan berkah yang ditimbulkan oleh proses penyatuan ekonomi dunia itu. Peningkatan niaga internasional mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh belahan dunia: meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, menurunkan harga, serta meningkatkan daya beli para pekerja.

Pertumbuhan luar biasa dalam perdagangan internasional selama beberapa dasawarsa terakhir adalah pendorong dan sekaligus dampak dari globalisasi. Volume perdagangan dunia meningkat 27 kali lipat dari US\$ 296 miliar hingga US\$ 8 triliun pada 2005. Sebagai buah dari meningkatnya perdagangan internasional, konsumen di seluruh dunia juga menikmati pilihan produk dan jasa yang lebih luas ketimbang jika mereka hanya mengandalkan produk dan jasa domestik.

KEGELISAHAN MENGHADAPI GLOBALISASI

Tapi penyatuan ekonomi dan perdagangan internasional juga memicu kegelisahan ekonomi, politik dan sosial. Karena ekonomi global terhubung dan terikat satu sama lain, ketika negeri ekonomi maju mengalami resesi, efeknya bisa dirasakan di seluruh dunia. Ketika volume perniagaan menyusut, lapangan kerja dan bisnis menghilang. Globalisasi bisa menjadi tulang punggung perniagaan internasional; tapi juga sekaligus bisa memiliki dampak yang mengerikan.

Globalisasi karenanya juga sangat kontroversial. Pendukung globalisasi beragumen bahwa itu memungkinkan negeri miskin dan warganya berkembang secara ekonomi dan meningkatkan standar kehidupan, sementara penentang globalisasi mengklaim bahwa penciptaan pasar bebas global yang tiada penghalang hanya menguntungkan perusahaan multinasional di Barat dengan merugikan perusahaan lokal, budaya lokal dan rakyat kebanyakan.

Perlawanan terhadap globalisasi terbentuk baik di tingkat rakyat maupun pemerintahan ketika orang dan pemerintah mencoba mengatur aliran modal, buruh, barang dan gagasan yang membentuk gelombang globalisasi sekarang.

Runtuhnya Blok Sosialis Soviet sempat mempersuasi warga dunia bahwa sistem kapitalis lebih unggul dari sosialisme dan karenanya memicu gelombang globalisasi pasar bebas dan kapitalisme ala Reagan dan Thatcher lebih jauh. Namun krisis finansial Amerika dan Eropa belakangan, serta maraknya gelombang protes seperti di Israel, menunjukkan bahwa dunia memerlukan keseimbangan baru.



Perlawanan terhadap globalisasi ekonomi belakangan bahkan menemukan momentum besar di Amerika Latin. Diilhami oleh Hugo Chavez dari Venezuela, Amerika Latin kini menginginkan keluar dari orbit Amerika Serikat baik secara politik maupun dalam kebijakan ekonomi.

Pandangan bahwa Konsensus Washington merupakan instrumen kolonialisme baru juga makin nyaring didengar. Liberalisasi dan deregulasi yang dituntut oleh globalisasi pasar-bebas dipandang telah melucuti banyak peran negara dalam melindungi rakyatnya di hadapan predator perusahaan-perusahaan multinasional.

GLOBALISASI: MITOS DAN REALITAS

Salah satu kritik terhadap globalisasi datang dari Anita Roddick (1942-2007), pendiri produsen produk kosmetika The Body Shop dan seorang aktivis sosial. Roddick memelopori praktek usaha beretika dan lantang

kritiknya terhadap bisnis perusahaan multinasional yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan memperlakukan buruh di negeri berkembang dengan buruk.

Setahun sebelum Roddick meninggal, The Body Shop dibeli oleh L'Oreal yang merupakan anak perusahaan multinasional Nestle. Kritik-balik kepadanya datang bertubi-tubi. Pembelian itu melukiskan kompromi dalam diri Roddick. Dia beralih membiarkan The Body Shop dibeli agar praktek perusahaan yang beretika juga mempengaruhi praktek bisnis Nestle.



Anita Roddick

Lepas dari itu, bersama beberapa perempuan aktivis lain seperti Naomi Klein, Arundhati Roy dan Vandana Shiva, Roddick banyak menulis artikel dan buku yang mengkritik

keras globalisasi dan neoliberalisme. Salah satunya sebuah buku populer berjudul **“Take It Personally: How Globalization Affects You and How to Fight Back”** (Thorsons; 2001) yang dicuplik di bawah ini.

Roddick terutama mengkritik filosofi dasar dari beberapa aspek dalam Konsensus Washington; dan lewat kritik ini kita bisa memahami setidaknya dua klaim berbeda tentang globalisasi. Menurut Roddick, dalam globalisasi:

PASAR LAH YANG BERKUASA

Mempreteli peran dan kewajiban pemerintah, serta membebaskan perusahaan “swasta” dari setiap ikatan yang dikenakan oleh pemerintah tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya.

ANGGARAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL DIKEBIRI

Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, semua itu atas nama pengurangan peran negara.

DEREGULASI MERAJALELA

Memangkas hukum dan aturan yang bisa mengurangi penciptaan laba, termasuk ukuran-ukuran untuk melindungi hak buruh dan pelestarian lingkungan hidup.

PRIVATISASI MENGEJALA

Menjual perusahaan, barang dan layanan milik negara kepada investor swasta. Walaupun dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang seringkali memang dibutuhkan, privatisasi mengkonsentrasikan kemakmuran kepada segelintir tangan dan membuat rakyat miskin tak bisa mendapatkan barang serta layanan karena mahalnnya.

KONSEP “MILIK BERSAMA” DAN SOLIDARITAS SOSIAL DIENYAHKAN

Mengurangi tanggungjawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”. Membiarkan kaum termiskin untuk menemukan solusi sendiri atas mahalnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial serta menyebut mereka “malas” jika mereka gagal.

Roddick jugamengecamglobalisasiekonomi/kapitalisme sebagai mitos, yang berkebalikan dengan realitanya:

MITOS 1: Demokrasi dan kapitalisme berjalan seiring

REALITAS: Demokrasi dan ekonomi pasar yang sehat memang merupakan cita-cita bagus karena merupakan basis bagi berkembangnya masyarakat yang mampu mengorganisasikan diri dan memperlakukan anggotanya secara setara.

Tapi, kapitalisme adalah pembunuh maut bagi keduanya. Kapitalisme menciptakan ilusi di dalam pikiran mereka yang berkuasa bahwa ideologi ini merupakan mesin kemakmuran, sementara faktanya merupakan mesin perusak dan pencipta ketimpangan. Dalam definisi, desain dan praktek, kapitalisme adalah sistem yang akan mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi ke tangan segelintir orang dan mengesempingkan banyak orang, artinya: tidak demokratis.

MITOS 2: Globalisasi akan mengakhiri kemiskinan

REALITAS: Globalisasi ekonomi menciptakan kemakmuran, tapi hanya untuk segelintir elit yang diuntungkan oleh konsolidasi kapital, merger, teknologi

skala global, dan aktivitas finansial seperti bursa saham dan bursa uang. Pasang naik perdagangan bebas dan globalisasi semestinya “mengangkat semua kapal” dan mengakhiri kemiskinan. Tapi, dalam setengah abad setelah diperkenalkan, lebih banyak kemiskinan di dunia ketimbang sebelumnya, dan situasinya terus memburuk.

MITOS 3: Globalisasi akan mengakhiri kelaparan dunia

REALITAS: Globalisasi pertanian telah gagal dalam mengatasi krisis kelaparan di dunia. Pada kenyataannya, justru telah memperburuk krisis. Selama dua dasawarsa terakhir, jumlah pangan di dunia terus meningkat, namun meningkat pula jumlah kelaparan. Sebuah studi PBB belum lama ini menunjukkan bahwa dunia sebenarnya cukup akan pangan. Problemnya ada dalam distribusi yang tak merata. Globalisasi produksi pangan telah meminggirkan petani kecil dari tanahnya dan menggantinya dengan industri pertanian kimiawi yang padat mesin. Globalisasi produksi pangan memproduksi pangan yang salah dalam suatu proses yang membuat jutaan petani kehilangan tanah, tak punya rumah, miskin uang, dan bahkan tak bisa memberi makan sendiri.

MITOS 4: Globalisasi baik untuk lingkungan

REALITAS: Globalisasi secara inheren bersifat merusak alam karena menuntut produk dan jasa bergerak ribuan kilometer keliling dunia, melonjakkan ongkos lingkungan yang demikian mahal dalam bentuk polusi udara dan air, peningkatan konsumsi energi, dan penggunaan bahan kemasan serta pengawet kimiawi yang tak terurai.

Kemakmuran yang diperoleh dari perdagangan dunia sangat sedikit dibelanjakan untuk program perbaikan lingkungan. IMF dan Bank Dunia justru praktis memastikan perusakan lingkungan itu.

MITOS 5: Globalisasi ekonomi tidak bisa dihindari

REALITAS: Para pendukung globalisasi ekonomi cenderung melukiskan globalisasi sebagai proses yang tak terhindarkan, atau merupakan muara logis dari seluruh benturan gaya ekonomi dan teknologi yang berjalan selama berabad-abad. Mereka melihat globalisasi kapitalisme sebagai hukum alam.

Tapi, globalisasi ekonomi bukanlah evolusi yang natural. Lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, GATT, NAFTA dan WTO menempatkan nilai ekonomi di atas nilai-nilai lainnya, serta menindas kemampuan tiap negara untuk melindungi lingkungan, buruh, dan konsumen. Globalisasi semacam itu bahkan cenderung menolak kedaulatan serta demokrasi sebuah negeri jika negeri itu nampak merintangangi “perdagangan bebas”.

Tapi, tak satupun dari itu tak bisa dihindari. Menyebut globalisasi sebagai tak terhindarkan adalah upaya menghipnotis orang untuk meyakini bahwa tak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah globalisasi, sehingga menciptakan sikap pasrah dan pasif.

Meliput Globalisasi, Berenang Antara Karang

MENEMUKAN keseimbangan yang bagus antara keuntungan dan kerugian yang dikaitkan dengan globalisasi, warga semua negeri di dunia perlu memahami bagaimana globalisasi bekerja dan pilihan kebijakan publik yang mereka hadapi.

- Apakah globalisasi itu penyatuan (integrasi) sistem politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia? Atau dominasi pengambilan keputusan negeri maju di hadapan negeri-negeri yang lebih miskin dan kurang berdaya?
- Apakah globalisasi itu kekuatan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran serta kebebasan demokratis? Atau kekuatan perusak lingkungan, eksploitasi dunia maju, serta pelanggaran hak asasi manusia?
- Apakah globalisasi hanya menguntungkan orang kaya? Atau orang miskin juga bisa memanfaatkan globalisasi untuk memperbaiki kehidupan mereka?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berbeda dari satu orang ke orang lain, satu lembaga ke lembaga lain, satu ekonom dari ekonom lain. Tergantung latarbelakang ideologinya. Para pendukung statusquo kebijakan ekonomi yang mengkritik kelompok anti-

globalisasi terlalu ideologis pada dasarnya memiliki bias/ kecenderungan ideologi pula.

Sesuai latarbelakang ideologi pula, lembaga dan ekonom seringkali menyodorkan data berbeda untuk fenomena yang sama: menonjolkan berkah globalisasi atau, sebaliknya, bencana globalisasi.

Penting bagi jurnalis yang ingin meliput isu globalisasi mengetahui spektrum luas setiap wacana, praktek maupun penilaian terhadap baik-buruk globalisasi. Bagan di bawah ini mencoba melukiskan spektrum tadi, beserta aneka aspek dari globalisasi, dengan beberapa catatan:

- Pengelompokan dalam spektrum adalah hasil penyederhanaan (simplifikasi). Tidak sepenuhnya hitam-putih.
- Opini lembaga atau orang bisa bersifat dinamis, tidak tetap, seringkali menyesuaikan keadaan dan kepentingan sesaat. People change!
- Untuk sekaligus memahami beragam aspek, tema dan spektrum globalisasi, silakan gali dari mesin pencari di internet (Google, Yahoo) tentang nama lembaga maupun tokoh yang disebut.
- Dengan kata lain, kata kunci, istilah serta nama yang disebut di bawah juga menjadi jalan masuk untuk lebih jauh mengeksplorasi rujukan yang relevan dan beragam tentang globalisasi.

Pro-Globalisasi		Anti-Globalisasi	
Akar Ideologi			
Kapitalisme Adam Smith		Sosialisme- Demokratis John Maynard Keynes	Marxisme/ Sosialisme Karl Marx
Model Negara			
Amerika Serikat		Welfare-state: Skandinavia Kapitalisme- Negara: China	Uni Soviet
Watak Kebijakan Publik			
Pro-swasta Subsidi publik kecil Deregulasi, liberalisasi		Welfare-state	Pro-publik/negara Subsidi publik besar Regulasi, kontrol negara
Watak Ekonomi			
Free-private- enterprise		Social-enterprise (koperasi)	State-control
Partai Politik			
Republik (AS) Konservatif (Inggris)		Partai Buruh (Inggris) Sosial-Demokrat (Eropa)	Partai Komunis (Soviet)
Pemikir Kontemporer			
Milton Friedman		Saul Alinsky Anthony Giddens Andre Gunder Frank	Chris Harman
Organisasi/Badan Internasional			
World Economic Forum IMF, World Bank, WTO			World Social Forum Porto Allegre
Slogan Kampanye			
There Is No Alternative (Margaret Thatcher)			Another World is Possible (World Social Forum)

NGO Internasional			
Friedrich Naumann Foundation American Enterprise Institute			Friedrich Ebert Foundation Jubilee Center
NGO Indonesia			
Freedom Institute			Institute for Global Justice INFID, Koalisi Anti Utang
Ekonom Indonesia			
Wijoyo Nitisastro Sri Mulyani Marie Elka Pangestu Chatib Basri Mohamad Ikhsan	Sumitro Djojohadikusumo Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Faisal Basri, Didik Rahbini Indria Samego, Henri Saporini, Rizal Ramli		Kwik Kian Gie Revrisond Baswir Sritua Arief Adi Sasono Ivan Hadar
Kolumnis/Ekonom Internasional			
Thomas Friedman Francis Fukuyama Fareed Zakaria George Soros	Joseph Stiglitz Amartya Sen Dani Rodrik Jeffrey D. Sachs George Monbiot		Noam Chomsky Naomi Klein Arundhati Roy Vandana Shiva Michael Moore
Teknologi Informasi			
Microsoft Bill Gates	Macintosh Steve Job		Linux, Ubuntu Linus Torvalds
Media/Koran/Majalah			
The Wall Street Journal The Financial Times The Economist			The Guardian Le Monde Diplomatique El Pais

Sebagai manusia, jurnalis sendiri tidak mudah untuk lepas dari bias dan kecenderungan ideologi. Itu sebabnya, jurnalis peliput globalisasi perlu membaca dan memahami spektrum tadi serta berusaha mewawancarai lembaga/

ekonom yang beragam. Jurnalis perlu memeriksa lebih dalam klaim dari setiap paham atau mazhab, dan lebih menekankan apa dampak serta maknanya bagi kepentingan publik, lepas dari apapun label ideologinya.

DARI PERANG IRAK HINGGA JOKOWI DI SOLO

Ekonomi tidak pernah sepenuhnya lepas dari politik. Dan sebaliknya, kebijakan politik tak lepas sepenuhnya dari motif ekonomi. Jurnalis yang ingin meliput globalisasi juga semestinya memahami bahwa mazhab globalisasi disebarkan melalui politik, bahkan kadang perang. Begitu pula sebaiknya, paham anti-globalisasi bermain di tataran politik, baik dalam lingkup dunia maupun lingkup negara. Di era otonomi daerah sekarang, bahkan politik lokal provinsi maupun kabupaten juga tidak lepas dari tarik ulur dua kekuatan pro dan anti-globalisasi.

Perang, atau lebih tepatnya invasi, Amerika di Irak dan Afghanistan tidak hanya bermotif politik tapi juga ekonomi. Penggulingan Saddam Hussein memungkinkin pemerintahan baru yang didukung Amerika melakukan liberalisasi sektor migas, memberi kesempatan raksasa multinasional Amerika beroperasi di Irak. Para pengecam globalisasi mengancam praktek semacam itu dan mereka bergandengan tangan para aktivis anti-perang.



Pasukan Amerika di Irak

Di tingkat nasional, pertempuran kekuatan pro dan anti-globalisasi juga termanifestasi dalam proses penyusunan kebijakan publik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, melalui proses politik di atmosfer demokratis.

Di Indonesia pasca-Reformasi, banyak undang-undang yang mencerminkan semangat deregulasi dan liberalisasi dihasilkan oleh pemerintah maupun DPR: UU Minyak dan Gas, UU Sumber Daya Alam, UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU Modal Asing, UU Jaminan Sosial, UU Badan Usaha Pendidikan, UU Kesehatan dan sebagainya.

Pertengkaran antara Walikota Solo Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tentang pembangunan sebuah mall mencerminkan ketegangan antara dua kekuatan pro-bisnis-investasi besar (globalisasi) dan semangat untuk melindungi pedagang kecil dari gempuran perusahaan

nasional maupun multinasional.

Tak hanya penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah di tingkat nasional, peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten juga diwarnai ketegangan semangat pro dan anti-globalisasi. Di tingkat lebih kecil lagi, yakni tingkat komunitas, munculnya tuntutan untuk melindungi dan menghidupkan kembali peraturan adat tradisional dan peraturan desa juga sedikit banyak merupakan manifestasi dari ketegangan tadi.

Pembahasan dan penyusunan berbagai kebijakan publik serta undang-undang tidak hanya melibatkan para politisi tapi juga aktor-aktor ekonomi serta kelompok penekan seperti LSM/NGO, asosiasi profesi dan asosiasi pengusaha seperti KADIN. Tidak pula hanya melibatkan aktor-aktor lokal melainkan juga perusahaan, NGO dan pemerintahan asing, melalui lobi, tekanan politik dan kadang-kadang diwarnai suap serta money-politics yang cenderung tidak demokratis.

Tak heran jika tema-tema pro atau anti-globalisasi juga menjadi bagian dari kampanye politik di musim pemilihan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Jurnalis peliput globalisasi seringkali perlu pula memeriksa kaitan antara dimensi ekonomi dan politik ini. Sedikit banyak mereka perlu mengetahui siapa aktor politik, apa saja legislasi yang sudah, sedang dan akan dibahas di DPR, serta apa kecenderungan kebijakan publik yang dijanjikan dan diperjuangkan oleh tiap partai politik. Tapi, yang lebih penting, jurnalis perlu menelusuri potensi dampak dari suatu kebijakan publik yang dirumuskan melalui proses politik bagi kehidupan rakyat kebanyakan.

Sejumlah Tema Liputan Globalisasi

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi sebuah negeri, atau bahkan provinsi/kabupaten, yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi, adalah kompleks yang melibatkan berbagai hal. Bagi reporter, meliput berita ekonomi ini bisa sangat menantang.

Reporter cenderung menghindari berita panjang yang berisi konsep yang abstrak, tapi terfokus pada peristiwa aktual dan angka-angka keras. Masalah menjadi lebih sulit lagi, karena ekonomi berkaitan dengan politik dan ideologi.

Politisi kiri lebih peduli pada lapangan kerja dan regulasi pemerintah. Politisi berhaluan kanan lebih peduli harga-harga murah dan privatisasi. Politisi maupun pengamat ekonomi juga menyoroti dan mempertentangkan nilai positif atau negatif dari pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan dalam isu globalisasi:

Pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara meliput ekonomi pada dasarnya menulis tentang bagaimana bekerjanya sebuah negara:

- Apakah ekonomi tumbuh atau surut?
- Sektor yang mana tumbuh dan mengapa?
- Apakah pertumbuhan akan berlanjut?
- Apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan

ekonomi apa yang dijalankan dan apakah itu efektif?

Sama seperti meliput perusahaan, angka juga penting di sini. Jurnalis yang baik akan memfokuskan diri pada bagaimana angka-angka itu mempengaruhi hidup banyak orang.

Memasukkan manusia dalam berita akan membuat tulisan lebih menarik dibaca, lebih relevan dan menunjukkan efek nyata data abstrak kepada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Beberapa Indikator Ekonomi Makro yang sering dibahas:

- **Produk Domestik Bruto (GDP).** Total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negeri pada periode tertentu.
- **Produk Nasional Bruto (GNP).** Total barang dan jasa yang diproduksi sebuah negeri baik secara domestik atau di luar negeri.
- **Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index).** Ukuran harga sekelompok barang yang dikonsumsi rumah tangga dalam periode tertentu.
- **Indeks Harga Produser (Producer Price Index).** Ukuran harga sekelompok barang yang digunakan produsen untuk membuat produk atau jasa.
- **Data niaga.** Data aktivitas seperti ekspor dan impor, serta defisit/surplus perdagangan dan anggaran.
- **Lapangan kerja.** Data ini bisa dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan/hilang atau jumlah pengangguran dalam periode tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau penyusutan ekonomi:

Faktor Eksternal

- Gejolak harga komoditi, seperti minyak.
- Resesi di negeri tetangga, ekspor berkurang.
- Krisis ekonomi di negeri lain. Investasi menyusut, suku bunga naik.
- Nilai tukar mata uang internasional. Jika dolar menguat, demikian pula rupiah. Produk Indonesia akan lebih mahal di luar negeri, dan kurang bersaing.
- Iklim. Perubahan musim seperti kemarau bisa mempengaruhi ekspor komoditas tertentu.

Faktor Internal

- Kebijakan fiskal, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Kebijakan pajak, berapa akan dikumpulkan dan dari mana.
- Defisit. Pemerintah membelanjakan lebih banyak dari yang bisa diperoleh dari pajak. Akan cenderung menyunat pengeluaran, menaikkan suku bunga atau berutang.
- Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral. Mencetak uang, kebijakan uang ketat.
- Inflasi: harga barang dan jasa.

Iklim Usaha dan Lapangan Kerja. Data statistik penyerapan lapangan kerja, usaha pemerintah menciptakan lapangan kerja atau perubahan dalam undang-undang perburuhan.

Perdagangan. Meliputi negosiasi antar negara dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk liberalisasi perdagangan.

UU Investasi Asing, deregulasi. Akan mempengaruhi arus investasi asing, yang berpengaruh pada sektor industri dalam negeri. Ketika meliput ini penting untuk mewawancarai pejabat pemerintah, bisnismen asing, asosiasi dagang seperti KADIN.

Privatisasi. Ketika negara menjual perusahaan ke investor swasta atau asing.

Pembangunan infrastruktur. Pembangunan pelabuhan, bandara, jalan, akan mempengaruhi ekonomi lebih luas.

Anggaran Belanja Pemerintah. Pemerintah menerbitkan rencana anggaran tahunan, berapa uang akan dibelanjakan dan bagaimana pendapatan diperoleh.

Kebijakan Pajak. Pemerintah menentukan berapa banyak uang diperoleh dari pajak (perusahaan, individu).

Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah memainkan peran dalam membiayai program sosial (pensiun, kesejahteraan masyarakat, bantuan untuk penganggur, dan orang-orang miskin).

Nilai tukar mata uang. Harga mata uang lokal yang diperjual-belikan dibandingkan mata-mata uang asing utama seperti dollar, yen dan euro.

Utang Publik/Negara. Negeri berkembang seperti Indonesia sering meminjam uang dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank dan menerima berbagai prasyarat dari pinjaman itu, seperti kebijakan ekonomi yang mereka diktakan.

Negosiasi utang. Dilakukan dengan organisasi kreditor swasta seperti The London Club atau kelompok negara kreditor seperti Paris Club.

Bailout. Injeksi dana sering diberikan kepada pemerintahan, perusahaan atau bank yang terjerumus dalam utang dan menuju kebangkrutan. Sumber dana bailout seringkali datang dari lembaga bersifat multilateral, seperti IMF. Secara domestik, injeksi dana kepada perusahaan dan bank swasta biasanya diberikan oleh pemerintah/negara. Dana yang disuntikkan bisa berasal dari utang (obligasi) negara. Dan itu menimbulkan kontroversi. Layakkah publik menanggung perusahaan swasta yang bangkrut?

ANGKA PERTUMBUHAN VS INDEKS KEBAHAGIAAN

Angka pertumbuhan ekonomi (atau peningkatan GDP) adalah ukuran yang paling populer digunakan banyak negara mengukur sukses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negeri diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menurunkan harga, serta meningkatkan daya beli para pekerja.

Namun, angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator sukses sering menuai kritik pula. Pertumbuhan ekonomi

dipandang terlalu makro atau global sebagai ukuran. Dan seringkali, pertumbuhan ekonomi tinggi dibarengi munculnya kesenjangan, dan bahkan memperparah kemiskinan pada sebagian rakyat. Kesenjangan ekonomi saja, bukan kemiskinan, kadang sudah menciptakan kerusuhan sosial akibat munculnya persepsi ketidakadilan antara kaya dan miskin.



Karikatur mengkritik ketimpangan pendapatan di Amerika

Kesenjangan pendapatan atau kemakmuran sebuah negeri diukur melalui Koefisien Gini. Koefisien ini mengukur kesenjangan dalam distribusi pendapatan, nilai koefisien 0 menunjukkan persamaan total sementara nilai 1 menunjukkan kesenjangan total (maksimum). Bersama pertumbuhan ekonomi tinggi, kesenjangan pendapatan

di Indonesia juga meningkat. Sekarang nilai Kofisien Gini Indonesia sekitar 0,39. Artinya, tingkat kesenjangan lebih tinggi dari Pakistan, Bangladesh atau Ethiopia yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Kesenjangan Indonesia juga lebih tinggi dari Malaysia yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi hampir sama.

Banyak perdebatan pula tentang apakah laju pertumbuhan ekonomi tinggi berperan mengurangi kemiskinan. Sebagian ekonom memandang pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh globalisasi meningkatkan pendapatan seluruh rakyat meski tetap ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Sebagian lain memandang pertumbuhan ekonomi cenderung membuat yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin, sehingga tidak pernah memecahkan, justru makin memperparah, problem kemiskinan.

DATA KEMISKINAN

Perdebatan ini bisa diverifikasi melalui data angka kemiskinan. Namun, ada beberapa versi angka kemiskinan dikeluarkan oleh lembaga berbeda akibat perbedaan metode, dan kriteria kemiskinan. Di Indonesia, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) umumnya lebih rendah dibanding angka kemiskinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Kedua angka itu juga lebih rendah dibanding angka kemiskinan berdasar standar Bank Dunia (yakni orang yang berpendapatan US\$ 2 per hari).

Dalam rangka menunjukkan sukses pembangunan ekonomi dan untuk mendukung konsep pertumbuhan ekonomi, pemerintah umumnya lebih suka memakai data

angka kemiskinan versi BPS, yang paling rendah.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Angka laju pertumbuhan ekonomi dipandang kurang sempurna untuk menilai sukses pembangunan ekonomi karena terlalu sempit bertumpu pada aspek ekonomi. Pada 1990, Badan Dunia Urusan Pembangunan (UNDP) mengeluarkan kriteria baru mengukur keberhasilan ekonomi lebih komprehensif. Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) yang diusulkan UNDP mengukur tak hanya ekonomi, tapi juga aspek sosial dan kesehatan seperti usia harapan hidup, keamanan, standar hidup, pendidikan dan tingkat melek huruf.

Pada 2011, angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia naik satu tingkat di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Angka itu naik dari 2010, tetapi peringkatnya turun dari sebelumnya 108 dari 169 negara yang disurvei. Untuk lima besar Asean, selama dua dekade terakhir, peringkat Indonesia itu masih rendah dibanding Vietnam, yang berada di peringkat 105, Thailand (78), Malaysia (63), dan Singapura (25).

INDEKS KEBAHAGIAAN

Pada 2006 sejumlah ekonom mengusulkan pengukuran lain terhadap sukses pembangunan: Indeks Kebahagiaan yang mengukur kualitas hidup manusia dan dampak lingkungan dari pembangunan. Mereka beragumen tujuan utama pembangunan bukanlah membuat orang menjadi kaya, secara ekonomi, tapi menjadi bahagia. Diukur dengan indeks ini, Indonesia termasuk kelompok negeri paling tidak bahagia di Asia, bersama Laos. Kita kalah bahagia dari

negeri Asean lain bahkan dari Timor Leste.

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

Berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menandatangani sebuah tekad yang dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs). MDGs adalah sasaran pembangunan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim, pengurangan tingkat kematian bayi, dan kerjasama global untuk pembangunan sosial, yang diharapkan dicapai pada 2015.

Dalam hal ini prestasi Indonesia belum menggembirakan. Tingkat kematian bayi pada 2010, misalnya, masih sangat tinggi, yakni 2.900 bayi per 100.000 kelahiran hidup. Padahal target MDGs pada 2015 nanti ditetapkan tak boleh lebih dari 104 kematian bayi per 10.000 kelahiran hidup.

PENCABUTAN SUBSIDI DAN KEMISKINAN

Usaha mengurangi kemiskinan dan mengejar target MDGs kadang berhadapan langsung dengan proses globalisasi. Salah satu prasyarat perdagangan bebas dan globalisasi adalah penghapusan subsidi, termasuk subsidi bahan bakar.

Pencabutan subsidi bahan bakar adalah salah satu konsep turunan dari restrukturisasi ekonomi (Structural Adjustment Program) gaya The Washington Consensus yang disusun oleh ekonom Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pencabutan subsidi itu merupakan bagian dari resep liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Para penggagasnya tahu bahwa pencabutan subsidi akan membuat rakyat menderita, terutama rakyat yang miskin.



Seorang nenek
mencari ikan di
Kepulauan Togean

Pencabutan subsidi bahan bakar membebani orang miskin jauh lebih berat. Sebaliknya, orang kaya tidak merasakan dampak berarti dari kenaikan harga bahan bakar maupun harga-harga barang kebutuhan pokok yang mengikutinya.

Kenaikan harga bahan bakar memicu kenaikan ongkos transpor dan biaya produksi semua barang serta jasa. Beras harus diangkut. Guru juga harus diantar ke sekolah. Kenaikan harga barang dan jasa akan menyeret turun daya beli masyarakat.

Kenaikan belanja keluarga untuk makanan, misalnya, bisa mencapai Rp 100 ribu per bulan. Bagi keluarga berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, kenaikan itu hanya 1% saja. Sementara bagi keluarga yang berpendapatan Rp 800.000 per bulan (seperti buruh pabrik), kenaikan itu

artinya sebesar 12,5%.

Untuk mengurangi rasa sakit orang miskin IMF/Bank Dunia memperkenalkan konsep social safety net, atau jaring pengaman sosial, dalam bentuk bantuan tunai langsung. Ide dasarnya adalah memang mengubah subsidi tak langsung (bahan bakar) menjadi subsidi langsung (bantuan tunai).

Meski konsep kompensasi itu pada dasarnya bagus, penerapan di lapangan bisa sangat rumit. Bantuan langsung tunai diberikan dari pintu ke pintu kepada orang miskin. Di sini, kita memerlukan data kemiskinan yang akurat hingga orang per orang. Ketiadaan data seperti itu dan problem manajerial dalam distribusi bantuan membuat konsep yang bagus bisa amburadul dalam praktek. Dan itulah yang terjadi.

Walhasil, sementara subsidi sudah dicabut kompensasinya tidak sampai atau tidak memadai untuk mengobati problem yang diakibatkan pencabutan subsidi. Orang miskin lagi-lagi menjadi korbannya yang paling parah.

Pencabutan subsidi tanpa memperhitungkan konsekuensi jelas memperparah problem kemiskinan dan memperdalam jurang kesenjangan ekonomi.

PERDAGANGAN BEBAS, KOMPETISI BEBAS

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan badan terpenting dalam konteks globalisasi. Di bentuk pada 1995, WTO dibuat untuk mengawasi dan meliberalisasi perdagangan internasional.

Salah satu prinsip perdagangan yang dipromosikan adalah bahwa barang dan jasa bisa leluasa bergerak dan diperjual-belikan lintas negara. Ada beberapa konsekuensi

dari prinsip tersebut:

- Tiap negara harus memperlakukan produk asing sama seperti produk domestik. Tiap negara harus “membuka pasar” bagi produk asing.
- Negara tak boleh mendiskriminasi produk asing misalnya dengan bea impor yang tinggi sehingga harganya akan lebih mahal dari produk domestik.
- Negara tak boleh mensubsidi produk domestik sehingga harganya bisa lebih murah dibanding produk impor, atau harganya bisa bersaing jika produk itu diekspor ke negara lain.
- Setiap barang dan jasa yang diproduksi oleh satu negara akan bersaing secara bebas dengan barang dan jasa dari negeri lain.
- Setiap negara juga harus menghormati serta melindungi paten atau hak cipta produk negara lain dari pembajakan atau pemanfaatan secara ilegal.

Dengan prinsip tadi, barang dan jasa akan bisa bebas diperjualbelikan lintas negara, meningkatkan volume perdagangan internasional dan diharapkan meningkatkan kemakmuran bersama warga dunia.

Para pendukung globalisasi berpendapat ketatnya persaingan bebas akan memacu tiap negara dan tiap pengusaha untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan ongkos produksi yang ditunjukkan oleh efisiensi produksi. Kompetisi juga diharapkan akan memacu kreativitas dan inovasi, dua penggerak utama kemajuan industri.



Namun, dalam praktek tidak semudah itu. Beberapa negara jelas mustahil memproduksi barang dengan kualitas maupun harga yang bisa bersaing dengan barang dari negeri lain karena berbagai faktor: tersedianya bahan baku, upah dan kualitas buruh, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kualitas manajemen produksi.

Industri otomotif

Inilah salah satu keberatan utama di kalangan anti-globalisasi. Perdagangan bebas mereka pandang akan cenderung hanya menguntungkan negeri-negeri maju yang mampu memproduksi barang berkualitas karena penguasaan ilmu, teknologi dan manajemen. Sementara banyak negeri berkembang hanya akan semata menjadi pasar. Kesenjangan ekonomi antara negeri maju dan negeri berkembang sendiri dikhawatirkan akan semakin lebar menganga.

Secara teoritis, perdagangan bebas itu berlaku untuk

semua jenis barang dan jasa, termasuk jasa profesi seperti dosen, universitas, dokter dan pengacara. Berlaku untuk semua barang: dari pangan dan produk pertanian hingga obat, perlengkapan kedokteran, mesin berat dan pesawat.

Juga secara teoritis, produk barang dari sebuah desa di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah akan bersaing bebas dengan barang dari sebuah desa di Negara Bagian Iowa, Amerika Serikat.

Para pendukung globalisasi menyadari banyak produk negeri berkembang (seperti mesin berat dan produk yang sarat teknologi) tak mungkin bersaing dengan produk negeri maju. Namun, kata mereka, negeri berkembang akan tetap diuntungkan karena pasti lebih mungkin bersaing dalam produk pangan dan pertanian dibanding negeri maju, sehingga keadilan perdagangan tetap bisa dicapai.

Tidak semudah itu pula. Negara maju mungkin telah menurunkan atau meniadakan bea impor barang dari negeri berkembang. Namun, melalui aturan yang rumit, seperti kewajiban untuk sertifikasi pada produk kayu dan pertanian, serta standar tinggi perlindungan konsumen, tetap mempersulit produk negeri berkembang masuk ke negeri maju.

DOHA ROUND, MONSANTO DAN BALADA PETANI JAGUNG

Pada 2001, WTO memang memperkenalkan Perundingan Doha (Doha Round) yang dimaksudkan untuk memudahkan negeri berkembang mengekspor produk pertanian ke negeri maju. Melalui perundingan ini, negeri maju diharapkan menghapus aturan ketat masuknya produk pertanian dari negeri lain dan menghapus subsidi

terhadap pertanian mereka. Namun, hingga 10 tahun kemudian perundingan itu menemui tembok buntu. Negeri-negeri maju seperti Amerika tetap menolak menghapus subsidi pertanian mereka.



Ini menjadi salah satu sumber malapetaka lain bagi negeri berkembang seperti Indonesia yang ekonominya bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan. Dari tahun ke tahun, Indonesia menghapus subsidi kepada petani, nelayan dan usaha kecil demi mematuhi perundingan perdagangan bebas WTO; sementara produk pertanian tetap sulit diekspor.

Pengurangan atau penghapusan subsidi di sektor pertanian dan kelautan membuat hancur kehidupan petani dan nelayan, memperluas pengangguran di pedesaan,

**Petani di Pulau
Sumbawa**

memperparah kemiskinan serta memacu urbanisasi besar-besaran ke kota besar. Pada saat sama, Indonesia makin hari makin terjebak semata menjadi pasar belaka produk asing, termasuk pangan dan produk pertanian.

Ini memicu persoalan lain yang lebih serius. Ketergantungan Indonesia pada pangan impor bisa berakibat fatal ketika terjadi kelangkaan pangan atau melonjaknya harga pangan dunia. Keamanan dan kedaulatan pangan Indonesia terancam.

Di sisi lain, hancurnya usaha pertanian oleh para petani diperparah oleh masuknya investasi asing dalam bidang pangan dan pertanian ini. Perusahaan multinasional seperti Monsanto kini merambah hingga pelosok pedesaan Indonesia, termasuk menguasai penjualan bibit berpaten. Beberapa tahun lalu sempat muncul kasus yang boleh dikatakan dampak langsung dari globalisasi: seorang petani ditangkap polisi karena memanfaatkan secara ilegal bibit jagung yang patennya dimiliki Monsanto.

PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR

Bahan bakar merupakan satu komponen penting dalam produksi banyak barang dan jasa. Pencabutan subsidi bahan bakar karenanya juga merupakan salah satu konsekuensi perdagangan bebas dan globalisasi, agar tidak terjadi diskriminasi antara barang asing dan barang domestik.

Di samping satu konsekuensi dari globalisasi, pemerintah dan para ekonom pendukung pencabutan subsidi bahan bakar mengajukan argumen bahwa subsidi tak langsung, seperti subsidi bahan bakar, akan buruk bagi ekonomi. Subsidi seperti ini, yang dihitung berdasar selisih harga domestik terhadap pasar internasional, dianggap menjadi

biang inefisiensi dan rendahnya daya saing ekonomi negara di era globalisasi. Itu sebabnya, kata mereka, harga harus dinaikkan setara harga internasional. Dan subsidi perlu diubah menjadi subsidi langsung, sesuai sasaran: dana kompensasi.

Pada dasarnya, argumen seperti itu bisa diterima asal dipikirkan secara komprehensif, lengkap dengan besaran maupun prasyarat infrastrukturnya, serta diterjemahkan dalam kebijakan publik yang konsisten.

Para pendukung pencabutan subsidi bahan bakar perlu berpikir lebih mendalam tentang apa yang dimaksud efisiensi dan peningkatan daya saing ekonomi dalam kaitan dengan harga internasional. Argumen tentang "harga internasional" memiliki akar dalam pandangan "market-based system" atau yang dikenal sebagai pilar kapitalisme.

**Gelandangan.
Adakah jaminan
sosial buat mereka?**



Kita tahu bahwa tak pernah ada sistem yang sempurna, termasuk dalam "market-based system". Itu sebabnya, bahkan negeri-negeri kapitalis Barat pun menyediakan mekanisme koreksi, antara lain dalam "unemployment benefit", "social security" dan bantuan ekspor untuk sektor pertanian. Semua ini pada dasarnya subsidi: jika perusahaan bangkrut dan buruh dipecat, kehidupan si buruh akan ditanggung negara; demikian pula, negara menanggung "keamanan sosial" warga, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Subsidi dalam bentuk "unemployment benefit" dan "social security" ini jumlahnya cukup besar: sekitar separoh dari pengeluaran rata-rata negara kapitalis di Barat. Itulah yang membuat ekonomi di Barat lebih kompetitif. Adalah absurd bagi Indonesia menghapus subsidi bahan bakar untuk menyesuaikannya dengan harga internasional tanpa menyiapkan "unemployment benefit" dan "social security" yang setara. Melakukan itu sewenang-wenang makin membenamkan daya saing negeri ini secara kolektif di pasar global.

SIAPA DELEGASI INDONESIA DI WTO?

Meliput globalisasi, khususnya aspek perdagangan bebas, para jurnalis perlu memahami mekanisme perundingan WTO serta apa saja aspek yang dibahas beserta dampaknya bagi kehidupan petani, nelayan dan konsumen Indonesia. Para jurnalis jarang membahas ini termasuk siapa saja sebenarnya delegasi Indonesia dalam sidang dua tahunan WTO, agenda apa yang mereka bawa ke sidang, dan apa yang mereka perjuangkan atau kalah perjuangkan dari negeri lain.

PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL

Di samping perjanjian perdagangan bebas yang global lewat WTO, banyak negara termasuk Indonesia juga membentuk blok perdagangan bebas seperti Asean Free-Trade Agreement (AFTA) atau bahkan perjanjian perdagangan bebas bilateral seperti Perdagangan Bebas Indonesia-Jepang misalnya.

Sejak 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara Asean, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai 2008. Selanjutnya mulai 2010 perdagangan bebas akan berlaku di seluruh wilayah Asia Pasifik.

Indonesia barangkali tidak mungkin berkelit sama sekali dari perjanjian-perjanjian perdagangan bebas semacam itu. Namun, ini juga menuntut kesiapan yang lebih serius baik di tingkat nasional maupun daerah. Tantangan bagi daerah-daerah adalah menyiapkan diri menghadapi globalisasi perekonomian untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumberdaya yang efisien dan efektif.

Identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat penting dilakukan berdasarkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar setiap daerah bisa memanfaatkan keunggulan masing-masing.

INVESTASI DAN PRIVATISASI: UANG TAK PUNYA IDEOLOGI

Di samping luasnya pergerakan barang dan jasa lintas negara, bebasnya lalu-lintas investasi dan modal juga

merupakan aspek penting dari globalisasi. Negara-negara diminta menghilangkan hambatan untuk investasi dan masuknya modal swasta, baik domestik maupun asing. Uang harus dibebaskan melintasi negara; uang tak punya ideologi katanya.

Ada beberapa aspek dari investasi asing. Bagi pemilik modal, keleluasaan untuk berinvestasi di negara lain merupakan peluang untuk ekspansi bisnis, memperluas pasar, serta peningkatan kepemilikan aset. Bagi negeri yang menerima investasi, ekspansi modal dan bisnis akan memperluas lapangan kerja dan membangkitkan bisnis-bisnis baru bagi rekanan lokal.

Investasi asing dan ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan



Hadirnya industri otomotif asing, misalnya, akan menumbuhkan usaha-usaha karoseri dan suku cadang lokal. Lebih dari itu, pemerintah lokal juga akan menerima pendapatan dalam bentuk lain seperti pajak. Pertumbuhan lapangan kerja dan ekspansi bisnis lokal akan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Hadirnya investasi swasta atau pabrik asing juga diharapkan akan membawa transfer ilmu, teknologi, ketrampilan, dan mutu manajemen bagi aktor-aktor lokal.

Investasi swasta, baik domestik maupun asing, juga didorong gelombang privatisasi, aspek penting globalisasi yang lain. Perusahaan negara atau daerah dijual ke investor swasta. Layanan publik yang tadinya dikuasai negara diserahkan kepada swasta lokal maupun asing.

Masuknya investasi swasta ke sektor publik diharapkan akan bisa meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan efisiensi agar publik bisa menikmati layanan atau produk lebih murah.

KARPET MERAH INVESTOR

Melihat berbagai aspek positif tadi, banyak pemerintah, baik nasional maupun lokal, menerima konsep investasi swasta/asing sebagai kewajiban, bahkan keharusan. Pemerintah nasional maupun lokal berlomba-lomba memikat investor. Namun, perlombaan itu juga diilhami oleh motif lain: pemerintah kekurangan anggaran untuk menyediakan layanan publik, modal awal eksploitasi sumber daya lokal dan biaya membangun infrastruktur publik.

Negara satu bersaing dengan negara lain, kabupaten satu berlomba dengan kabupaten lain, untuk menggelar karpet merah bagi investasi swasta maupun asing. Dalam

**Booklet Promosi
Investasi Tingkat
Kabupaten**

perlombaan itu, pemerintahan dituntut untuk melakukan deregulasi: memudahkan perizinan, fasilitas keringanan pajak, lisensi eksploitasi sumber daya alam. Deregulasi diharapkan juga bisa mendorong reformasi birokrasi dan menghapus budaya korupsi.



Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah berlomba memikat investasi asing yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perusahaan asing dibolehkan membeli perusahaan lokal atau membentuk perusahaan patungan. Perusahaan asing diharapkan membawa teknologi dan ketrampilan manajemen agar perusahaan lokal bisa berkompetisi di pasar global.

Namun, di samping semua aspek positif tadi, ada pula sejumlah problem berkaitan dengan investasi dan privatisasi ini.

Harapan pada transfer teknologi dan ketrampilan manajemen tidak selalu bisa terwujud dalam praktek. Teknologi berkaitan dengan paten dan globalisasi mengharuskan negara atau pemerintah lokal menghormati serta melindungi paten dan hak cipta asing. Ini menjelaskan mengapa meski perusahaan asing dalam bidang otomotif dan migas telah puluhan tahun masuk ke Indonesia, mereka tetap berkuasa dengan kecil kemungkinan perusahaan lokal berpartisipasi.

Harapan bahwa privatisasi dan investasi asing akan membuat produk lebih kompetitif dan murah juga tidak selalu ditemukan dalam praktek. Privatisasi dan investasi asing dalam layanan air minum di Jakarta (Thames dari Inggris dan Lyonnaise dari Prancis) menunjukkan hal itu. Air minum yang disubsidi tetap akan lebih murah dari yang dihasilkan oleh swasta. Lebih dari itu, privatisasi yang berorientasi pada pasar akan membuat perusahaan cenderung melayani konsumen/warga yang berdaya beli tinggi (kaya) sehingga kecil kemungkinan mereka membangun jaringan air minum ke kawasan orang miskin.

Orang miskin akhirnya tetap membayar mahal untuk memperoleh air bersih.

Lisensi atau izin eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah nasional maupun daerah masih sering diwarnai oleh kongkalikong dengan pejabat maupun anggota DPR, yang melibatkan suap dalam bentuk uang maupun saham. Praktek seperti ini melestarikan kultur korupsi, bukannya menghapus.

KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA

Penguasaan bisnis oleh swasta dan asing yang terlalu dominan juga menjadi sorotan banyak pengamat karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada keamanan dan kedaulatan negeri. Kepemilikan saham asing pada telekomunikasi nasional misalnya bisa menjadi pintu masuk spionase dan rawan bocornya rahasia negara. Fakta menarik, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang diprivatisasi (Telkomsel) tidak dibeli oleh swasta melainkan oleh perusahaan negara milik Singapura.

Banyak negara maju sendiri, seperti Amerika, pada kenyataannya tidak sangat bebas menerima privatisasi dan investasi asing. Kongres Amerika melarang perusahaan migas Unocal dibeli oleh PetroChina dan melarang perusahaan Dubai mengambil-alih bisnis pengelolaan enam pelabuhan di Amerika Serikat, karena alasan keamanan negara. Terbukti bahwa uang ternyata juga tak selalu buta ideologi.

Privatisasi dan investasi swasta di sektor publik, seperti pembangunan jalan atau jaringan air minum, juga cenderung memusatkan pembangunan ekonomi di tempat-tempat orang berdaya beli tinggi. Motif swasta adalah keuntungan

dan mencari pasar. Kecil kemungkinan swasta mau berinvestasi di daerah langka penduduk atau berpenduduk miskin. Bertumpu terlalu besar pada investasi swasta akan cenderung menggemukkan ekonomi di kota besar atau di Jawa, memicu urbanisasi besar dari kantong kemiskinan dan dari luar Jawa. Ketimpangan antar daerah akan semakin menganga.

Negara dan daerah tertentu harus bersaing ketat dalam memikat investor swasta domestik maupun internasional. Untuk membujuk investor, pemerintah nasional dan lokal bisa terjebak memanjakan berlebihan dan melakukan deregulasi kelewatan: lisensi jangka panjang merugikan masyarakat, standar perburuhan yang rendah (termasuk larangan mendirikan serikat buruh), serta standar keamanan lingkungan dan pencemaran yang rendah.

INDUSTRI TANPA KAKI

Harapan investasi akan menyerap lapangan kerja juga tidak selalu terwujud. Tergantung pada jenis investasinya. Bagi kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, fakta bahwa 75% pekerja Indonesia berpendidikan SLTP, dan murah akan menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis industri potensial dikembangkan di Indonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya (garment, tekstil, sepatu, elektronik).

Selama hampir 25 tahun, pemerintah percaya dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah jenis industri paling gemar melakukan relokasi (footloose industries). Pemindahan lokasi industri ke negara yang menawarkan upah buruh lebih kecil, peraturan longgar, dan



**Pabrik garmen,
industri tanpa kaki**

buruh melimpah.

Sementara itu, Indonesia masih belum banyak mengembangkan jenis industri yang lebih menjanjikan kelestarian lapangan kerja. Yakni industri yang memiliki keunggulan absolut (*absolute advantage*) seperti industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, dan kelautan, yang kecil kemungkinan berpindah karena terikat pada sumber daya lokal.

Para jurnalis yang ingin meliput aspek investasi dan privatisasi dari globalisasi perlu memeriksa dampak positif dan negatif di atas. Hanya dengan begitu mereka bisa membantu masyarakat dan politisi memilah-milah jenis investasi dan sektor publik mana yang bisa diprivitasi dan dimasuki modal asing tanpa merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

UTANG PUBLIK (NEGARA) DAN UTANG SWASTA

Konsensus Washington yang menjadi tulang punggung proses globalisasi semula dipandang sebagai resep manjur mengatasi krisis keuangan dan utang Amerika Latin pada 1980-an. Resep serupa diharapkan bisa berlaku di negara-negara lain dengan beban utang tinggi seperti Indonesia. Namun, ada indikasi bahwa globalisasi tidak menyelesaikan masalah, namun justru membenamkan negeri seperti Indonesia dalam jebakan utang yang kian dalam.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia juga terjebak ke dalam arus ketergantungan terhadap utang (luar negeri maupun domestik) dalam jumlah yang mencekik. Sejak pertengahan 1980-an, Indonesia tidak lagi sekedar membuat

Karikatur mengkritik jebakan utang



utang baru sembari mengangsur utang lama, tetapi terpaksa membuat utang baru untuk melunasi utang lama.

Sementara itu, kemampuan mengelola utang terbilang sangat lemah. Indonesia adalah satu-satunya negara tanpa debt management office. Utang luar negeri “dikelola” lewat dan dari tiga pintu (BI, Bappenas, Departemen Keuangan) yang seringkali tidak satu pemahaman. Meskipun terakhir, Indonesia sudah melunaskan utangnya kepada IMF, namun banyak yang meragukan negeri ini mampu menelorkan kebijakan sosial-ekonomi yang menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumah sendiri dengan mengapresiasi kebutuhan dasar mayoritas rakyatnya.

Utang luar negeri (publik dan swasta) Indonesia relatif tinggi sekarang ini, sekitar US\$ 130 miliar. Pembayaran utang luar negeri pemerintah ternyata memakan porsi yang besar dari APBN untuk pembayaran pokok dan bunga utang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Pada tahun 2000, misalnya, sekitar 15,4 persen penerimaan dalam negeri dipakai untuk membayar utang luar negeri setelah dikurangi dengan nilai utang yang dijadwal ulang. Pada periode 2001-2004 rasio ini mengalami kenaikan yang signifikan, berkisar antara 13-20 persen.

Saat ini, alokasi pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri semakin besar menjadi Rp 69,6 triliun atau menyerap sekitar 32 persen (sepertiga) dari porsi total penerimaan pajak rakyat. Hal ini berarti pajak yang dibebankan kepada masyarakat hanya habis dipakai untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Sejak itu, beberapa tambahan utang baru telah melambungkan alokasi cicilan bunga dan pokok utang.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Departemen Keuangan, pada 31 Agustus 2008 jumlah utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia yang jatuh tempo atau harus dibayar pada 2009-2015 sangat tinggi. Pada 2009, jumlah utang yang harus dibayar mencapai Rp 97,7 triliun, sekitar Rp 58,65 triliun adalah utang luar negeri. Pada 2015, Indonesia masih harus membayar utang senilai Rp 81,54 triliun, sebesar Rp 39,08 triliun adalah utang luar negeri.

Akibat himpitan utang, penegakan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi-sosial-budaya rakyat cenderung dikorbankan atas nama pembangunan. Praktik kekerasan demi pembangunan, meski dengan cara yang “demokratis” (dibandingkan 32 tahun Orde Baru) masih terjadi: pedagang kaki lima tergusur atas nama pembangunan; tanah rakyat dibeli dengan harga murah atas nama pembangunan; para pekerja harus hidup paspasan tanpa perlindungan yang cukup atas nama pembangunan; sementara itu, “orang miskin dilarang sakit” serta “dilarang mengesep pendidikan memadai”.

PENYANGGA YANG DILUPAKAN: USAHA KECIL DAN KOPERASI

Ketika perusahaan-perusahaan besar bertumbuhan pada Krisis 1998, usaha informal rakyat, usaha kecil-menengah serta koperasi ternyata bisa menjadi penyangga yang membuat ekonomi negara tidak kolaps sama sekali.

Namun, euforia gelombang globalisasi seakan melupakan pelajaran penting tadi. Perhatian pemerintah kepada mereka masih sangat kurang. Sementara kecenderungan pencabutan subsidi yang diamanatkan oleh globalisasi makin memperlemah mereka, bukan memperkuat daya

saing mereka.

Perdagangan adalah jantung perekonomian, proses berlangsungnya pergerakan dan pemerataan kekayaan, beserta pertumbuhan kesejahteraan yang dihasilkannya. Kewirausahawanan menjadi salah satu pilar pokok pengembangan produksi dan perdagangan.

Porsi sektor informal dalam kegiatan perdagangan di Indonesia mencapai di atas 95%, yang melibatkan usaha rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai sektor.



Sektor informal kakilima

Usaha kecil memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sektor usaha kecil di bidang perdagangan, pariwisata dan industri boga, dengan investasi yang sama, mampu

menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah dan besar.

Pemerintah telah meluncurkan beberapa program kredit usaha rakyat melalui bank-bank negara. Namun, program ini belum menciptakan wirausaha baru. Kebijakan-kebijakan pengembangan usaha kecil secara umum akhir-akhir ini tidak mendukung dan tidak prospektif terhadap pengembangannya. Kekuatan ekonomi bermodal besar lebih mempengaruhi kebijakan publik seperti yang terlihat dalam undang-undang penanaman modal, undang-undang sumber daya air, undang-undang migas, dan sebagainya. Dilihat dari sisi lain, pertumbuhan kue ekonomi pasar tradisional di Indonesia adalah minus pertumbuhannya, sedangkan hypermarket terus membesar, yang juga merupakan efek langsung dari globalisasi.

PERBANKAN, PASAR UANG, DAN BURSA SAHAM

Di samping bebasnya aliran barang, jasa dan investasi, luasnya aliran uang adalah aspek mencolok lain dari globalisasi. Bursa saham adalah salah satu instrumen lalulintas investasi yang paling mudah dan cepat.

Berkat kemajuan teknologi informasi seperti internet, kini orang bisa membeli saham lintas negara, di Wall Street misalnya, tanpa harus beranjak dari kamarnya di Jakarta. Melalui online trading, uang bergerak secepat orang memencet tombol keyboard, serta membuka peluang bagi individu, tak cuma lembaga keuangan besar, untuk berinvestasi di negara-negara lain yang memiliki bursa.

Dunia perbankan hampir tak terpisahkan dari bursa saham pula. Jual-beli saham juga merupakan salah satu cara para bankir mencari laba, di samping jual-beli valuta asing

dan obligasi atau surat utang. Bank investasi membantu perusahaan maupun pemerintah menerbitkan surat utang atau melakukan go-public untuk memperoleh modal dan dana. Belakangan ini di Indonesia bahkan mulai muncul usulan agar tak hanya pemerintah nasional, melainkan pemerintah daerah boleh menerbitkan obligasi.



Bursa Saham New York Stock Exchange

Para ekonom sering mengatakan sistem perbankan adalah jantung ekonomi sebuah negeri karena bank memompakan uang ke sistem ekonomi dan membuat ekonomi berjalan.

Bank tempat orang dan perusahaan menyimpan uang dengan imbalan bunga tabungan/deposito. Dan

meminjamkan pada orang atau perusahaan kredit dengan bunga lebih tinggi lagi. Dari selisih situlah para bankir mendapat laba.

Naiknya harga sejumlah saham, atau indeks saham, sebuah bursa sering menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi sebuah negeri. Namun, sebagai instrumen investasi, bursa saham tidak selamanya positif. Di samping rawan spekulasi, uang beredar sangat cepat di situ. Investor dengan mudah mengalihkan pemilikan saham dari satu perusahaan ke perusahaan, dari satu negara ke lain negara, dalam hitungan hari, bahkan jam atau menit. Sebuah perusahaan bisa bangkrut dalam hitungan jam ketika orang mengalami kepanikan, oleh suatu faktor tertentu, dan berlomba menjual saham perusahaan tersebut.

Di samping bursa saham, orang juga mengenal pasar obligasi, valuta asing, bursa niaga komoditas seperti kakao atau minyak. Meliput pasar seperti ini sering membosankan, tapi berguna pada reporter baru untuk bereaksi cepat terhadap breaking-news. Berita pasar sangat cepat berubah, dari menit ke menit, jam ke jam.

Reporter bursa saham melaporkan kondisi keuangan di pasar dengan mengamati sejumlah indikator dan indeks, juga kondisi eksternal yang mempengaruhinya. Berita bursa umumnya mencoba memprediksi pergerakan harga, jangka pendek atau panjang.

- Dalam meliput pasar uang dan bursa saham beberapa aspek selalu menjadi pokok perhatian: Berapa volume jual beli dan berapa harganya? Peristiwa apa yang mempengaruhi indeks harga?
- Untuk berita bursa komoditas, perubahan musim sering merupakan berita utama. Kemarau akan



" I USED TO BE A STOCKBROKER BUT I'M LOOKING FOR A GIG A LITTLE EASIER ON THE STOMACH.. "

Karikatur mengkritik spekulasi di bursa saham

memicu harga beras, misalnya.

- Peristiwa eksternal juga penting, seperti perang, misalnya mempengaruhi harga minyak dan harga saham perusahaan berkaitan dengan minyak.
- Jika perusahaan melaporkan keuangan/laba yang membaik atau meluncurkan produk baru yang diprediksi laku, harga sahamnya akan naik.
- Uang datang dan pergi dengan cepat di bursa saham, obligasi, maupun valuta asing. Komputer dan internet memungkinkan uang bergerak cepat secepat kita memencet tombol keyboard.
- Uang yang beredar di bursa keuangan sering disebut "uang panas" atau "footloose money".
- Bursa saham juga rentan menjadi ajang kaum

spekulasi keuangan. Indeks bursa saham karenanya tidak bisa menjadi ukuran satu-satunya kesehatan ekonomi sebuah negeri.

Bursa saham mengharuskan perusahaan publik yang terdaftar menerbitkan laporan reguler baik kwartalan maupun tahunan. Perusahaan publik seperti ini umumnya tidak terlalu sulit ditembus oleh jurnalis; mereka sudah terbiasa dan bahkan diwajibkan untuk menerbitkan informasi ke publik.

Namun karena sudah berpengalaman, mereka cenderung bisa mengecoh jurnalis dengan membuat siaran pers yang menarik tapi tidak ada isinya. Penting untuk menggali lebih dalam sehingga tidak hanya mengulang berita bagus dari perusahaan bersangkutan. Berbicaralah dengan sumber independen.

Kiat Menyajikan Liputan Globalisasi

LIPUTAN globalisasi yang mencakup masalah ekonomi-bisnis-keuangan merupakan liputan yang penting. Memberikan informasi akurat tentang seluk-beluk transaksi keuangan, pembangunan ekonomi dan kondisi pasar merupakan unsur penting dalam membangun dan pertumbuhan demokrasi. Dalam satu aspek, liputan seperti itu membuat pemerintah lebih transparan dan akuntable terhadap warga negara, serta membuat bisnis/perusahaan bertanggungjawab terhadap konsumen dan masyarakat umum.

Liputan seperti ini juga penting mengingat globalisasi, melalui berbagai kebijakan publik pemerintah, memiliki dampak hingga kota kecil dan pedesaan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara.

Tapi, meski penting, di banyak media-massa Indonesia, berita tentang globalisasi, seperti umumnya berita ekonomi-bisnis, masih cenderung diabaikan. Jurnalis cenderung menghindarinya. Dan pembaca cenderung melewatkannya.

Bagi pembaca, berita ekonomi cenderung rumit (banyak istilah teknis) dan membosankan.

Bagi jurnalis, berita ekonomi dipandang kurang seru (dibanding berita kriminal/politik); terlalu menuntut jurnalis untuk banyak belajar padahal jurnalis tak punya

banyak waktu atau kurang mau belajar.

Salah satu keluhan umum tentang sajian liputan ekonomi adalah terlalu banyak angka, kering tanpa jiwa, terlalu banyak istilah teknis dan terlalu spesifik serta elitis.

Padahal, berkebalikan dengan pandangan umum tadi, liputan ekonomi dan bisnis globalisasi seringkali adalah tentang hidup dan mati, seperti ditunjukkan oleh drama Krisis 1998. Ekonomi tak terpisahkan dari hukum, politik dan bahkan kriminalitas. Tentang daging dan darah manusia.

Liputan globalisasi akan potensial menarik jika jurnalis bisa menyajikannya secara populer, hidup dan penuh warna baik dalam tulisan, visual (televisi) maupun suara (radio).

GLOBALISASI BUKAN SEKADAR WACANA

Liputan globalisasi tidak semata liputan pro-kontra wacana. Globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat banyak:

- Bank dan keuangan, kebijakan kredit, suku bunga.
- Lapangan kerja dan pengangguran.
- Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- Bisnis kesehatan, meliputi rumah sakit, dokter, klinik, farmasi, obat, pabrik peralatan, asuransi kesehatan.
- Sektor retail, supermarket, salon, toko musik, toko peralatan rumah tangga dan furniture, terutama tentang trend yang berpengaruh pada konsumen untuk membelanjakan uang.
- Teknologi, terutama inovasi dan trend dan berbagai sektor industri–pertanian, manufaktur, retail dan sebagainya

- Tenaga kerja, termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja berdasar jenis pekerjaan dan upah serta jumlah lapangan kerja.
- Wisata, hotel dan restoran, upaya baru dalam memikat turis dan perbaikan infrastruktur
- Kepailitan, perluasan usaha, waralaba, kurangnya tenaga kerja terlatih pada industri tertentu.
- Pertanian, olahraga, periklanan dan media.

Sejumlah Kiat Sederhana

Agar liputan globalisasi beserta dampaknya bisa lebih menarik, berikut ini sejumlah kiat:

Ciptakan cerita sendiri. Liputan isu globalisasi tidak semestinya dibangun hanya dari satu sumber, apalagi siaran pers dari satu lembaga, pemerintah, atau perusahaan. Anggaphlah siaran pers sebagai pijakan awal untuk meliput cerita nyata. Cari informasi, angle, sumber lain. Gali cerita lain.

Banyak lembaga pemerintah dan perusahaan memiliki divisi humas/public relations yang handal dan tangguh menghadapi jurnalis sehari-hari. Mereka bisa sangat membantu dan menjalin hubungan baik dengan mereka bisa sangat bermanfaat. Mereka bisa mengatur wawancara, memberi informasi cepat dan menjawab pertanyaan jika eksekutif tertinggi tak ada di tempat.

Tapi, tentu saja, tugas mereka adalah membuat agar pemerintah atau perusahaan nampak baik di mata publik; kepentingan mereka berbeda dengan kepentingan jurnalis.

Reporter yang bagus tak hanya mengandalkan beritanya dari siaran pers atau konferensi pers saja. Tapi, dia berupaya

untuk menjalin kontak reguler dengan sumber kredibel yang bisa memberi informasi lebih mendalam sebelum konferensi pers berlangsung. Lebih penting dari itu, dia tak enggan menggali masalah lebih jauh dari lapangan.

Gali lebih dalam. Pada masa kini, informasi dasar yang mentah bisa mudah didapatkan di internet, social media, TV, radio, atau bahkan perangkat handphone. Pembaca menginginkan sesuatu yang lebih mendalam: makna. Liputan globalisasi sebaiknya menonjolkan signifikansi dan dampak bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Keluarlah kantor. Pergilah ke tempat terjadinya peristiwa yang hanya secara abstrak atas sekilas dimuat dalam siaran pers dan berilah nyawa ke dalam tulisan atau feature yang dibuat. Pembaca yang menikmati cerita akan lebih memahami masalah.

Masukkan manusia nyata ke dalam cerita. Cari dan gali tokoh menarik untuk memasukkan nyawa dan warna dalam sajian. Kita tahu pembaca suka cerita human-interest dan suka membaca tentang manusia lain. Itu akan membuat menarik liputan ekonomi biasanya membosankan karena kering dan terlalu banyak istilah.

Pastikan cerita punya unsur kehidupan. Gunakan kutipan langsung untuk sumber-sumber berita. Kutipan langsung menunjukkan keotentikan dan aktualitas. Kutipan langsung juga membuat cerita bisa dibaca dan sekaligus serasa bisa didengar.

Memahami masalah lebih baik. Untuk membuat sajian menjadi populer dan mudah dipahami, jurnalis perlu pertama-tama memahami tema yang diliput. Jika jurnalis sendiri menilai satu tema membosankan dan misterius (karena ada sesuatu yang tidak dipahaminya), pembaca atau pemirsa juga akan menangkap kesan itu. Jurnalis perlu memperluas wawasan, tak hanya terbatas pada ekonomi dan bisnis. Ekonomi berkaitan dengan politik, pendidikan, kriminalitas, hukum.

Beri penjelasan dengan baik. Salah satu kepuasan jurnalis adalah melihat pembaca atau pemirsa memperoleh sesuatu dari sajiannya, sesuatu yang tidak mereka pahami sebelumnya. (Aha, saya mengerti sekarang!) Kemampuan menyajikan pemahaman pada pembaca merupakan salah satu kepuasan profesional seorang jurnalis.

- Tak cukup hanya 5W+1H
- Apa pentingnya, apa signifikansinya?
- Perluas cerita
- Apakah ini pertama kali terjadi dalam ekonomi negara, dalam perusahaan atau dalam sektor industri tertentu?
- Apakah suatu peristiwa merupakan bagian dari trend yang tengah berlangsung atau sebaliknya melawan trend yang sedang terjadi?
- Apakah peristiwa itu mewakili sinyal perubahan?
- Apa konsekuensi peristiwa itu bagi perusahaan, sektor industri tertentu, negeri, manusia dan hal-hal lain?
- Cari jawaban (reportase, wawancara pelaku, pakar).

Tidak semua detail relevan. Ketika mengawali tulisan atau sajian, jurnalis perlu menimbang seberapa banyak detail perlu dijejalkan di lead (teras) tanpa membuat pembaca atau pemirsa kewalahan melennya. Jangan terlalu banyak angka. Usahakan mengubah angka menjadi pengertian yang mudah dicerna. Contoh: gantilah “33%” menjadi “sepertiga”.

Satu paragraf setelah lead usahakan untuk segera mengatakan kepada pembaca dan pemirsa apa makna dari cerita itu tanpa mereka harus meraba-raba dan menduga-duga yang akhir kehilangan selera mengikuti cerita.

Konteks. Berikan latarbelakang dan konteks yang dibutuhkan. (Pembaca awam, kronologi, urutan masalah. Intangkan pembaca pada peristiwa yang relevan).

Istilah teknis. Kesulitan adalah memutuskan apa yang harus Anda jelaskan dan apa yang secara umum sudah diketahui dan dipahami pembaca.

Sisipkan definisi secara jelas, jernih dan jelas. Ketimbang menghentikan cerita untuk memasukkan definisi, gunakan frase yang mendefinisikan istilah teknis sebagai bagian dari kalimat dalam alur pelaporan yang wajar.

Contoh:

Definisi yang kaku: “defisit perdagangan adalah ketika sebuah negeri lebih banyak mengimpor dari mengeskpor”.

Lebih bagus memasukkan definisi tanpa terasa: “Pada 1998, defisit anggaran Indonesia meningkat 65%

menjadi \$270 milyar, yakni ketika negeri ini dipaksa membeli barang dan jasa dari luar negeri dalam laju lebih cepat dari perkembangan ekspornya. “

Ketrampilan yang dibutuhkan di situ: membuat definisi sebagai bagian dari informasi. Gunakan istilah teknis dalam kalimat normal dan lalu dalam kalimat berikutnya sisipkan pengertian/definisi mengenai istilah tadi seraya memberi informasi tambahan.

Contoh:

“Inflasi di Indonesia mencapai 6% pada 1998. Inilah pertama kali indikator yang dipakai pemerintah untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa naik melebihi 5% setahun dalam sepuluh tahun terakhir.”

Dalam contoh di atas, kita menyisipkan definisi “inflasi” seraya memberi informasi tambahan pada kalimat kedua.

Buat kuliah-mini. Seringkali apa yang dibutuhkan pembaca bukanlah hanya istilah teknis tapi pemahaman pada proses.

Contoh: harga saham jatuh karena ancaman kenaikan suku bunga.

“Investor mengkhawatirkan kenaikan suku bunga karena suku bunga yang tinggi akan menurunkan permintaan konsumen terhadap produk perusahaan tertentu yang sahamnya mereka miliki. Suku bunga tinggi juga meningkatkan beban pinjaman perusahaan itu. Maka harga saham perusahaan tersebut jatuh menyusul kuat dan luasnya persepsi di kalangan investor bahwa bank sentral akan segera menaikkan suku bunga.”

Mencari sumber, menggali info

Menulis populer lebih sulit dari membuat tulisan yang sarat akan istilah tanpa mencoba menjelaskan. Selalu luangkan waktu untuk riset untuk mengetahui lebih banyak tentang berbagai aspek globalisasi, baik pada tingkat kebijakan makro pemerintah maupun dampak mikro pada perusahaan kecil dan individu.

Melokalkan aspek globalisasi

Salah satu angle penting dalam pemberitaan globalisasi adalah menarik masalah itu ke tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan bahkan desa tempat nelayan dan petani tinggal.

Misalnya, apa dampak dari perjanjian kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-Eropa:

- Apakah ekspor akan meningkat? Atau justru impor? Apakah memicu ekspansi dan investasi perusahaan asing ke sini, meningkatkan persaingan? Apakah konsumen diuntungkan? Apakah dampak bagi pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah?
- Kunjungi negeri bersangkutan. Gali informasi apakah mereka akan mengimpor/mengekspor lebih banyak sebagai buah dari perjanjian itu.
- Gali informasi apakah ada cukup modal untuk memperluas produksi demi memasok kebutuhan baru.
- Apakah ada cukup dana untuk impor agar perusahaan lokal bisa memproduksi lebih banyak untuk ekspor

- Apakah produk lokal cukup bermutu untuk bersaing di pasar internasional.
- Pelajari infrastruktur lokal dan pelabuhan apakah mereka bisa menangani lalulintas barang yang meningkat.

Buat Angka mudah Dipahami

Buatlah angka-angka lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pemirsa. Angka-angka penting dalam berita ekonomi, tapi harus disajikan secara jelas dan sederhana. Jika mungkin sajikan dalam infografik yang memikat. Hindari alenia panjang penuh data statistik dan angka.

Ketika menulis tentang data-data itu perlu diingat beberapa hal sebagai berikut:

- Selalu bandingkan angka sekarang dengan angka setahun lalu atau periode yang sama di tahun lalu.
- Perbandingan sederhana tidak memadai dan menyembunyikan detil yang penting. GDP sebuah negeri mungkin tidak tumbuh tapi ada perubahan dalam sektor tertentu yang tak nampak pada angka keseluruhan. Amati lebih rinci.
- Waspadalah dengan perubahan musiman. Di Indonesia, misalnya, belanja konsumen akan meningkat menjelang perayaan Idul Fitri. Data dari bulan-bulan sekitar Idul Fitri tidak mencerminkan data seluruh tahun.
- Selalu letakkan angka dalam konteks. Bagaimana perubahannya dalam beberapa tahun terakhir? Sesuai dengan trend yang terprediksi atau menyimpang dari trend?
- Kaitkan angka itu dengan kebijakan ekonomi yang

diterapkan pemerintah: perubahan suku bunga, kenaikan pajak.

- Bandingkan angka-angka. Data GDP seringkali direvisi, lihat apakah data itu data awal dan atau hasil revisi kemudian bandingkan dengan data awal dan revisi dari periode sebelumnya.
- Pengukuran Indeks Harga Konsumen (CPI) kadang berubah dari tahun ke tahun. Pastikan Anda membandingkan hal sama untuk periode berbeda.

Daftar Pustaka:

Covering Globalization: A Handbook for Reporters

| Editor: Anya Schiffrin dan Amer Bisat | Columbia
University Press | 2004

Globalization and Its Discontents | Joseph E. Stiglitz |

W. W. Norton & Company | 2003

Making Globalization Work | Joseph E. Stiglitz | W. W.

Norton & Company | 2006

The Lexus and the Olive Tree: Understanding

Globalization | Thomas Friedman | Anchor | 2000

Take It Personally: How Globalization Affects You and

How to Fight Back | Anita Roddick | Thorsons | 2001

Indonesia For Sale | Dandhy Dwi Laksono | Pedati |

2009

